



## Sosial Hukum dan Keadilan Untuk Semua: Menggugah Kesadaran Hukum pada Masyarakat Cahaya Negeri

**Melli Romanza, Eceh Trisna Ayuh<sup>\*</sup>, Titi Darmi**  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia  
<sup>\*</sup>Email: [ecehtrisna@umb.ac.id](mailto:ecehtrisna@umb.ac.id)

---

Article history :

Received : 25/09/2024  
Received in revised form : 25/11/2024  
Accepted : 31/12/2024

---

**Abstract:** Legal awareness within society is a key factor in establishing a just and orderly social structure. Unfortunately, in Indonesia, legal awareness remains relatively low, as reflected in the frequent legal violations occurring in both private and public spheres. The program "Law and Justice for All: Raising Legal Awareness in Society" aims to enhance public understanding of their legal rights and obligations, as well as the crucial role law plays in achieving social justice. This program includes various activities such as seminars, panel discussions, legal awareness campaigns, free legal clinics, and paralegal training, all designed to provide practical and easily applicable legal education for the wider community. The goal is not only to improve legal knowledge but also to change societal behavior to foster greater respect for and adherence to the law. With an inclusive educational approach, the program is aimed at the general public, encouraging active participation in law enforcement and reducing legal violations. Ultimately, higher legal awareness is expected to form the foundation for a more just and harmonious society.

**Keywords:** law, justice, legal awareness, society, paralegal training.

**Abstrak:** Kesadaran hukum di tengah masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun tatanan sosial yang adil dan tertib. Sayangnya, di Indonesia, kesadaran hukum masih tergolong rendah, yang tampak dari berbagai pelanggaran hukum yang sering terjadi, baik di ranah pribadi maupun publik. Program "Hukum dan Keadilan untuk Semua: Menggugah Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat" hadir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum, serta pentingnya peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi panel, sosialisasi hukum, klinik hukum gratis, dan pelatihan paralegal, yang dirancang untuk memberikan edukasi hukum yang praktis dan mudah diterapkan oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat agar lebih menghormati dan mematuhi hukum. Dengan pendekatan edukatif yang inklusif, program ini ditargetkan kepada masyarakat umum, mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum, serta mengurangi pelanggaran hukum. Harapannya, kesadaran hukum yang lebih baik dapat menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis.

**Kata Kunci:** hukum keadilan; kesadaran hukum; pelatihan paralegal

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan jaminan atas keadilan di setiap lapisan masyarakat. Melalui hukum, negara memastikan bahwa hak-hak setiap individu dilindungi dan kewajiban setiap warga negara ditegakkan (Nasir et al., 2023). Namun, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, masih terdapat kesenjangan besar antara adanya aturan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap penerapannya.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak hanya mencerminkan pengetahuan tentang peraturan yang ada, tetapi juga kesediaan untuk mematuhi dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya tingkat kesadaran hukum berpotensi memperlebar ketimpangan sosial serta menghambat upaya mencapai keadilan yang merata (Makmur et al., 2024). Selain itu, akses terhadap sistem peradilan juga sering kali terbatas bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau kurang memiliki sumber daya ekonomi. Sebagai langkah awal menuju peningkatan keadilan, sangat penting untuk menggugah kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Rato, D. 2021). Pendidikan hukum yang memadai, baik melalui jalur formal maupun non-formal, serta peningkatan akses terhadap sistem hukum merupakan dua faktor kunci yang dapat membantu memperkecil jurang kesadaran ini.

Masyarakat Cahaya Negeri terdiri dari beragam individu dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di komunitas tersebut. Akses terhadap informasi hukum dan edukasi formal tentang hak dan kewajiban hukum sering kali terbatas, sehingga masyarakat kurang paham tentang pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan berbagai pelanggaran hukum terjadi, baik di tingkat individu maupun kelompok, karena ketidaktahuan akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Ketidakhahaman masyarakat tentang hukum semakin diperburuk oleh persepsi yang keliru bahwa hukum hanya relevan dalam situasi yang serius seperti tindak kriminal atau kasus pengadilan besar (Valerian, 2022). Aspek hukum yang lebih umum, seperti hak-hak konsumen, hak pekerja, dan kewajiban

warga negara, sering diabaikan dalam keseharian. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan benar, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum secara menyeluruh.

Dalam menghadapi situasi ini, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah program edukasi hukum yang inklusif (Makmur et al., 2024). Edukasi hukum dapat mencakup seminar, diskusi panel, dan sosialisasi hukum yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Program ini harus menyesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat agar dapat menjangkau kelompok yang mungkin sebelumnya tidak terlibat atau memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memahami peran hukum dalam kehidupan mereka.

Selain itu, pelatihan paralegal dapat menjadi bagian penting dari upaya menggugah kesadaran hukum di Cahaya Negeri. Paralegal yang dilatih dapat memberikan bantuan hukum sederhana kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta merujuk kasus-kasus yang lebih kompleks kepada pengacara atau lembaga terkait. Pelatihan ini juga dapat memberdayakan masyarakat lokal agar mereka dapat membantu menyelesaikan masalah hukum di tingkat komunitas.

Pemerintah dan lembaga hukum setempat perlu mengambil peran aktif dalam memfasilitasi program-program edukasi hukum ini. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan inisiatif yang dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan (Nasir et al., 2023). Keterlibatan pemerintah sangat penting untuk menciptakan jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal, sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada integritas hukum dan lembaga yang mengelolanya.

Salah satu tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menjalankan hak mereka dan menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang benar. Meningkatkan pengetahuan hukum juga berarti mengurangi risiko pelanggaran hukum karena ketidaktahuan. Namun, program ini tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku

masyarakat dalam menghadapi hukum. Melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih patuh terhadap aturan hukum, lebih menghargai sistem hukum, dan terlibat dalam proses penegakan hukum secara aktif.

Perubahan perilaku ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan. Dengan adanya perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran hukum, masyarakat Cahaya Negeri akan lebih mampu berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan di komunitas mereka sendiri, melaporkan pelanggaran hukum, serta memberikan dukungan terhadap integritas hukum dan keadilan sosial. Ini juga akan membantu mengurangi pelanggaran hukum di masa depan.

Program edukasi hukum ini diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan harmonis di Cahaya Negeri. Masyarakat yang lebih sadar hukum akan mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan tertib. Dengan begitu, kesadaran hukum yang lebih baik dapat menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban hukumnya, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan hukum. Pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban akan membuat masyarakat lebih sadar akan tindakan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun public (Ihsani, 2021). Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan akan tercipta perilaku yang lebih bertanggung jawab di setiap lapisan masyarakat, sehingga konflik dan pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

Program ini bersifat preventif, yang berarti bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini dengan memberikan edukasi yang tepat. Dengan memberikan pemahaman tentang hukum melalui berbagai metode seperti seminar, pelatihan, dan diskusi, masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap potensi masalah hukum dan dapat mengambil langkah-langkah preventif. Edukasi ini juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang

lain dan memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum, sehingga kesadaran hukum tumbuh secara kolektif.

Selain bersifat preventif, program ini juga partisipatif. Artinya, masyarakat diundang untuk terlibat aktif dalam menjaga ketertiban hukum. Tidak hanya sebagai penerima aturan, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas sosial, melaporkan pelanggaran, dan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum di komunitasnya. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut sanksi, tetapi juga karena mereka memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan (Nasir et al., 2023).

Lebih jauh, program ini juga diharapkan dapat membangun tatanan sosial yang lebih beradab. Dengan masyarakat yang sadar hukum, tercipta budaya hukum yang menghormati aturan, menghargai perbedaan, dan mendorong keadilan sosial. Pengetahuan hukum yang merata di antara anggota masyarakat akan menciptakan iklim di mana semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal maupun nasional (Makmur et al., 2024).

Pentingnya program ini juga terletak pada kemampuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya tidak hanya akan patuh pada hukum, tetapi juga akan lebih kritis terhadap proses penegakan hukum itu sendiri (Ihsani, 2021). Ini berarti mereka dapat menuntut adanya keadilan yang lebih baik dari pihak berwenang dan mendukung transparansi dalam proses hukum, sehingga institusi hukum menjadi lebih efektif dan terpercaya.

Secara keseluruhan, program ini merupakan upaya untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dengan cara yang inklusif, berkesinambungan, dan berfokus pada perubahan perilaku. Program ini tidak hanya menargetkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, diharapkan terbentuk masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan menghormati hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

## **METODE DAN TEKNIS KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan program "Hukum dan Keadilan untuk Semua: Menggugah Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat", beberapa metode kegiatan akan dilaksanakan guna memberikan edukasi hukum secara efektif dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Berikut adalah metode kegiatan yang akan dilaksanakan:

### **1. Seminar dan Diskusi Panel**

Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti akademisi hukum, praktisi hukum (advokat) dan aktivis hak asasi manusia. Topik yang dibahas mencakup hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, penegakan hukum, serta peran masyarakat dalam menjaga keadilan sosial. Seminar akan diadakan secara tatap muka atau daring (jika diperlukan) dengan presentasi dari narasumber, diikuti dengan sesi tanya jawab interaktif. Diskusi panel akan menghadirkan berbagai sudut pandang untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat terhadap isu hukum yang sedang berlangsung.

### **2. Konsultasi Hukum Gratis**

Konsultasi hukum gratis merupakan layanan konsultasi hukum yang terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait masalah pribadi maupun komunal. Tim advokat dan mahasiswa hukum akan menyediakan sesi konsultasi satu per satu kepada masyarakat yang membutuhkan informasi hukum atau bimbingan terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Konsultasi hukum akan diadakan di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

### **3. Pelatihan Paralegal untuk Masyarakat**

Pelatihan paralegal ini bertujuan untuk membentuk kelompok paralegal dari kalangan masyarakat yang dapat memberikan bantuan hukum dasar di tingkat lokal. Materi pelatihan meliputi dasar-dasar hukum, hak asasi manusia, mediasi, dan cara memberikan konsultasi hukum dasar.

### **4. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diharapkan. Setiap kegiatan akan dipantau secara berkala oleh tim pelaksana. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data partisipasi, kuesioner, serta wawancara kepada peserta untuk mengetahui dampak program terhadap peningkatan kesadaran hukum mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan edukasi ini tujukan kepada Masyarakat yang masih kurang pengetahuan akan Hukum. Adapun pelaksanaan kegiatan melalui tahapan:

**Seminar dan Diskusi Panel** : Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum melalui seminar yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Dengan melibatkan akademisi hukum, praktisi hukum (advokat), dan aktivis hak asasi manusia, acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya akan memberikan pandangan mendalam tentang topik-topik penting seperti hak-hak warga negara, kewajiban hukum, dan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial.

Akademisi hukum akan fokus pada aspek teoretis, menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum yang membentuk fondasi sistem hukum di Indonesia. Mereka akan membahas bagaimana hukum dikembangkan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, mereka akan menyoroti pentingnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih kuat, serta mengurangi ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum.

Sementara itu, praktisi hukum seperti advokat akan berbagi pengalaman langsung dari dunia penegakan hukum. Mereka akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dijalankan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam membela hak-hak klien dan menegakkan keadilan. Advokat juga akan membahas berbagai kasus hukum yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat.

Di sisi lain, aktivis hak asasi manusia akan membawa perspektif yang berbeda dengan menyoroti peran hukum dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan. Mereka akan menjelaskan pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dalam berbagai situasi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Aktivis ini juga akan mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum yang adil dan merata.

Selain presentasi dari narasumber, kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan diskusi panel yang melibatkan semua pihak. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan berbagai sudut pandang mengenai isu-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan adanya diskusi panel, peserta seminar dapat melihat bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dari berbagai perspektif, baik dari sisi teoretis, praktis, maupun advokasi. Ini akan membuka wawasan peserta tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan sosial.

Kegiatan seminar ini akan diadakan secara tatap muka, namun jika situasi tidak memungkinkan, format daring juga akan diterapkan. Format daring memungkinkan peserta dari berbagai wilayah untuk tetap terlibat tanpa harus hadir secara fisik. Dengan teknologi yang tersedia, seminar daring akan tetap interaktif dengan fitur presentasi virtual, sesi tanya jawab, dan diskusi yang mendalam. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi hukum kepada lebih banyak orang.

Sesi tanya jawab interaktif merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan ini. Peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber mengenai berbagai isu yang telah dibahas. Dengan cara ini, peserta dapat memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan dan mengklarifikasi berbagai hal yang mungkin masih membingungkan. Sesi ini juga akan memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman mereka terkait hukum, sehingga diskusi menjadi lebih hidup dan relevan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih kritis terhadap isu-isu hukum yang sedang berlangsung di sekitarnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, hak, dan kewajiban, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban hukum dan mendorong keadilan sosial. Program ini

tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dalam cara masyarakat memandang dan menerapkan hukum (Rismawati, S. D. 2015).

Masyarakat yang paham tentang hukum akan lebih mampu melindungi hak-haknya sendiri, menghormati hak orang lain, dan secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, tatanan sosial yang lebih berkeadilan dan tertib dapat tercipta, di mana hukum dihormati dan dijalankan secara benar.

**Konsultasi Hukum Gratis:** Layanan ini dirancang untuk membantu individu yang memiliki masalah hukum, baik yang bersifat pribadi maupun komunal, namun mungkin kesulitan mengakses layanan hukum profesional karena keterbatasan finansial atau pengetahuan. Dengan adanya konsultasi hukum gratis, masyarakat dapat memperoleh informasi dan arahan yang tepat dalam menghadapi situasi hukum yang dihadapi, sehingga mereka tidak merasa terjebak dalam ketidakpastian.

Tim advokat yang berpengalaman akan memimpin sesi konsultasi, memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara profesional dan sesuai dengan standar hukum. Selain advokat, mahasiswa hukum juga dilibatkan sebagai bagian dari tim, memberikan mereka kesempatan untuk terjun langsung dalam praktik hukum dan membantu masyarakat. Kombinasi advokat berpengalaman dan mahasiswa hukum ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang tepat, sekaligus menjadi ajang pembelajaran bagi mahasiswa tentang bagaimana hukum diterapkan di dunia nyata.

Setiap konsultasi dilakukan secara tatap muka dalam sesi satu per satu, memungkinkan masyarakat untuk berbicara secara pribadi tentang masalah hukum mereka. Pendekatan ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan antara masyarakat dan tim hukum. Dalam setiap sesi, masyarakat akan mendapatkan penjelasan detail mengenai permasalahan hukum yang dihadapi, potensi solusi, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Agar layanan ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, konsultasi hukum gratis akan diselenggarakan di tempat-tempat strategis. Lokasi yang dipilih biasanya mudah dijangkau oleh masyarakat umum, seperti balai desa, pusat

komunitas, atau tempat publik lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang dapat datang dan memperoleh layanan hukum tanpa harus menghadapi hambatan geografis atau logistik.

Selain memberikan bimbingan hukum yang bersifat jangka pendek, konsultasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hukum, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi permasalahan hukum di masa depan (Hariyanto, H. 2014). Edukasi ini menjadi bagian integral dari konsultasi, karena salah satu tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas .

Secara keseluruhan, konsultasi hukum gratis berperan penting dalam menciptakan aksesibilitas hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat. Dengan mendapatkan bantuan dan nasihat hukum yang tepat, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dan siap dalam menghadapi tantangan hukum. Selain itu, program ini juga merupakan bentuk nyata dari kehadiran sistem hukum yang lebih merata, di mana keadilan tidak hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya, tetapi oleh semua lapisan masyarakat.

**Pelatihan Paralegal untuk Masyarakat** : Pelatihan paralegal ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang hukum, sehingga mereka dapat berperan sebagai paralegal di komunitas masing-masing (Dermawan, R. dkk. 2022) Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kelompok paralegal lokal yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum sederhana. Dengan adanya paralegal di tingkat komunitas, akses terhadap bantuan hukum dapat lebih mudah dan cepat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau yang tidak mampu menyewa pengacara.

Materi pelatihan meliputi dasar-dasar hukum yang mencakup pemahaman mengenai hukum pidana, perdata, dan administrasi, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta akan diajarkan tentang sistem hukum di Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara yang dilindungi oleh hukum. Pengetahuan ini penting agar paralegal mampu

memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai isu-isu hukum yang mereka hadapi (Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. 2021).

Selain itu, pelatihan ini juga mencakup topik hak asasi manusia, yang menjadi fondasi penting dalam pemberian bantuan hukum. Paralegal dilatih untuk memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dilindungi dan diperjuangkan melalui jalur hukum. Dengan pengetahuan ini, paralegal dapat membantu masyarakat dalam mengadvokasi hak-hak mereka, serta mendampingi mereka dalam proses hukum yang mungkin mereka hadapi.

Pelatihan juga melibatkan materi tentang mediasi, yang merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa secara damai. Paralegal akan dibekali keterampilan untuk menjadi mediator dalam konflik di tingkat komunitas, membantu menyelesaikan permasalahan tanpa harus membawa kasus ke pengadilan (Kurniawan, N. A. 2020). Mediasi ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan di masyarakat, serta mengurangi beban pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan secara lokal.

Terakhir, peserta pelatihan akan dilatih tentang cara memberikan konsultasi hukum dasar. Ini mencakup teknik mendengarkan secara aktif, menganalisis permasalahan hukum, dan memberikan solusi yang tepat. Dengan keterampilan ini, para paralegal diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi hukum yang efektif, membantu masyarakat memahami opsi hukum yang tersedia, serta mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara mandiri. Pelatihan paralegal ini pada akhirnya akan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum di lingkungannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Program "Hukum dan Keadilan untuk Semua: Menggugah Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat" telah berhasil mencapai beberapa tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan memberikan akses lebih luas kepada informasi dan bantuan hukum. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan sosialisasi hukum, konsultasi hukum gratis, serta pelatihan paralegal, program ini mampu menjangkau masyarakat luas, memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami, serta membangun kesadaran kritis terkait hak dan kewajiban hukum.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat meningkat. Sebagian besar peserta memahami pentingnya mematuhi hukum dan mulai menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara.
2. Konsultasi hukum gratis efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum. Klinik hukum gratis memberikan akses hukum yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang kurang mampu.
3. Pelatihan paralegal menghasilkan dampak jangka panjang. Para paralegal yang dilatih mampu memberikan bantuan hukum dasar kepada masyarakat di lingkungan mereka.
4. Materi edukasi hukum membantu menyebarkan informasi hukum Brosur, infografis, dan kampanye media sosial memperluas jangkauan program, terutama di kalangan generasi muda.

### Saran

1. Memperluas Cakupan Program ke Daerah Terpencil
2. Penguatan Peran Paralegal
3. Sosialisasi yang Lebih Gencar Mengenai Konsultasi Hukum Gratis
4. Evaluasi Berkelanjutan dan Pendokumentasian Dampak Program
5. Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur dampak jangka panjangnya.
6. Pengembangan Konten Edukasi yang Lebih Inklusif dan Interaktif

### DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, R., Rizal, M. C., Rachmatulloh, M. A., & Widodo, M. F. S. (2022). Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 165-191.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87-97.
- Hariyanto, H. (2014). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Ihsani, M. H. (2021). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 61. file:///C:/Users/user/Downloads/567-Article Text-3287-1-10-20230510.pdf.
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 28-33.

- Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). *Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial*. 6(1), 1–17.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan keadilan sosial dengan hukum progresif di era komodifikasi hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1-12.
- Rato, D. (2021). Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 285-308.
- Valerian, D. (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, 8(2), 415–443. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>